

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan:

1. Hakim dalam pembuktiannya terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak menggunakan sitem atau teori pembuktian *negatief wettelijk*, hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban tidak menjadikan keterangan saksi Anak Korban sebagai suatu alat bukti kuat dan relevan, karena keterangan Anak Korban mempunyai nilai pembuktian yang sangat signifikan karena anak dalam keterangannya tersebut sudah disumpah dan sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Namun dalam tindak pidana ini hakim terhadap perkara Abdurrahman menilai keterangan yang diberikan oleh saksi Korban anak tidak memiliki kekuatan hukum sebagai suatu alat bukti. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa hakim dalam menilai keabsahan/kekuatan pembuktian keterangan anak korban bersifat subjektif sesuai dengan aliran pemahaman hukum hakim terhadap pembuktian hukum dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan

pertimbangan non yuridis yaitu dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa. Dalam pertimbangan, hakim tidak melihat keterangan dari saksi korban serta surat permohonan dan pernyataan yang dibuat oleh korban yang dihadirkan di persidangan sebagai acuan untuk meringankan hukuman terdakwa. unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak secara keseluruhan tidak terpenuhi karena unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat bujuk rayu dari fakta di persidangan jelas terlihat bahwa persetubuhan itu terjadi karena kemauan dan paksaan dari korban. Di samping itu, pertimbangan hakim tersebut dinilai menurut teori pertimbangan hakim, belum menunjukkan pertimbangan hakim yang baik.

3. Asas keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg tidak terpenuhi, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidaklah adil karena hakim dalam pertimbangan hakim dan pembuktian tidak melihat dari keterangan saksi korban dan terdakwa sebagai bukti yang relevan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan, karena tindak pidana persetubuhan itu terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari saksi korban. Dikaitkan dengan teori keadilan maka dapat diketahui bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan Putusan No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dan tidak memenuhi asas keadilan. Apabila hakim

dalam pertimbangannya tidak memenuhi asas keadilan maka tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban ini akan sangat berpotensi untuk terus mengalami ketidakadilan, karena hakim dalam pembuktian putusan ini tidak melihat dari segi keadaan atau kondisi pelaku serta keterangan saksi serta keterangan terdakwa.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam putusannya perlu untuk secara cermat, jelas dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dapat menggambarkan kedudukan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim kepada setiap orang yang berkepentingan. terhadap putusan hakim. Selain itu, hakim diharapkan dapat memahami perkembangan terbaru dalam dunia hukum sehingga dapat menguatkan pemahaman dan keyakinan hakim berkaitan dengan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari saksi korban anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan revisi, agar dalam Undang-undang tersebut memberikan pengecualian terhadap pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari saksi korban anak, dan tidak melihat dari sisi korban saja melainkan juga melihat dari sisi terdakwa.